

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

**ULFA RIMA NUGRAHETA
B 200 130 271**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

ULFA RIMA NUGRAHETA
B 200130271

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta)



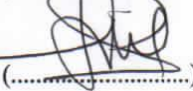
Oleh:

ULFA RIMA NUGRAHETA

B 200130271

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 8 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. M. Abdul Aris, M.Si. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin Adi Waskito, M.Si. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Phd (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 April 2017



Ulfa Rima Nugraheta
B 200130271

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, DAN PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada SKPD Kota Surakarta dengan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 115 eksemplar yang di bagikan kepada pegawai di bagian bendahara pengeluaran dan pegawai laporan keuangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 21.00. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta.

Kata kunci :Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of human resource competenc, internal control system, and the implementation of government accounting standards on the Quality of Local Government Financial Report (LKPD) in SKPD of Surakarta City. The population of this research is all staff in SKPDs of Surakarta City, using of questionnaires in data collection. Data collection is done by giving as many as 115 copies of the questionnaires which was distributed to all staff on expenditure treasurer and financial statements staff. The data obtained are then analyzed using SPSS 21.00. Based of the analysis result, obtained that the human resource competency has unsignificant effect on the Quality of Local Government Financial Report (LKPD) in SKPDs of Surakarta City, internal control system and the the implementation of government accounting standards on the Quality of Local Government Financial Report (LKPD) in SKPDs of Surakarta City.

Keyword: Human Resource Competency, Internal Control System, The Implementation of Government Accounting Standards, and Quality of Local Government Financial Report.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah (Rukmi, 2013). Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Febrian, 2015).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan Keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yuliani *et al*, 2010).

Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Dalam penelitian Febrian (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rustam

(2013) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal ini selaras dengan penelitian Febrian (2015) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian M. Ali (2015) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji ulang terkait dengan sistem pengendalian intern.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan telah dilakukan oleh Daniel (2013) yang memperoleh hasil penerapan sap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian M. Ali (2015) yang memperoleh hasil sebaliknya yaitu penerapan sap tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang mengkaji hubungan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan sap antara lain Febrian *et al.* (2015), M. Ali *et al.* (2015) dan Danielet *al.* (2013). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah menghilangkan variabel independen teknologi informasi, rekonsiliasi, peran ppk-skpd dengan menambahkan variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian (Umi Narimawati, 2008:161). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada dinas SKPD Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah bendahara pengeluaran, bendahara pemasukan, kepala bagian keuangan, dan staf bagian akuntansi penyusun laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Kota Surakarta; (2) SKPD yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang memiliki kepala SKPD setingkat Eselon II; (3) Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun; (4) Menjabat sebagai kepala dan atau staff bagian keuangan.

2.2. Definisi Operasional Variabel

2.2.1. Variabel Dependen

2.2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No.71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan adalah kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kualitas laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yang di dalamnya mencakup unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 4 indikator, yaitu: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Pengukuran Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan skala likert 5 poin.

2.2.2. Variabel Independen

2.2.2.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara (2012:40) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang yang mencakup unsur latar belakang pendidikan dan telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang telah diadakan.

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 2 indikator, yaitu: latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan. Pengukuran variabel kompetensi sumber daya manusia menggunakan skala likert 5 poin.

2.2.2.2. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 5 indikator, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Pengukuran variabel sistem pengendalian intern menggunakan skala likert 5 poin.

2.2.2.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan adalah standar akuntansi pemerintahan yang di dalamnya mencakup unsur kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan pembuatan laporan keuangan yang disajikan secara periodik.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 3 indikator, yaitu: kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku umum, pembuatan laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Pengukuran variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan menggunakan skala likert 5 poin.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen: kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan persamaan sebagai berikut:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 SDM + \beta_2 SPI + \beta_3 SAP + \varepsilon$$

Keterangan :

KLKPD = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

SDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

SPI	= Sistem Pengendalian Intern
SAP	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
ε	= Kesalahan Residual

2.4. Hasil dan Pembahasan

2.4.1. Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Maka, dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

2.4.1.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan tingkat signifikan 0.05. Hasil *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,820 dimana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,512. Hal ini menunjukkan bahwa data sebanyak 65 kuesionerdari 4 variabel yang digunakan berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

2.4.1.2. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF pada hasil uji multikolinearitas model regresi untuk semua variabel independennya kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

2.4.1.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *Sperman's Rho*. Hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa semua variabel independen menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

2.5.Pengembangan Hasil Uji Hipotesis

2.5.1.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis pertama (H_1) dapat diketahui variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,709 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,093 berada lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_1 ditolak dan ini berarti variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena kondisi tingkat pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga pegawai tidak dapat dengan cepat memahami apa yang harus dikerjakan. Rendahnya tingkat pemahaman pegawai terhadap tugas mengenai administrasi keuangan dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan.

Ditinjau dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai Subbagian Keuangan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sementara, fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi, namun pada kenyataannya secara praktik kondisi di lapangan sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

2.5.2.Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua (H_2) dapat diketahui variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,293 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada lebih rendah dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_2 diterima dan ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern dapat dikatakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dengan diterapkannya sistem pengendalian intern maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas, dan tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan, karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Apabila otorisasi pemisahan tugas sudah jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi yang dilaporkan akan akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ketiga (H_3) dapat diketahui variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,248 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada lebih rendah dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima dan ini berarti bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipil SKPD Kota Surakarta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah Kota Surakarta. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka terdapat kejelasan dan ketegasan standar yang dapat dipakai oleh pemerintah kota Surakarta dan tidak ada alasan untuk tidak menerapkan SAP. Penerapan SAP menjadi suatu keharusan agar laporan

keuangan pemerintah kota Surakarta dapat berkualitas, artinya memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*.

PENUTUP

3.

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 0,093 lebih besar dari 0,05. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

3.2. Keterbatasan

Penelitian yang telah dilakukan ini tidak terlepas dari keterbatasan yang ada, antara lain: (1) Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas SKPD Kota Surakarta sehingga hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya dapat diterapkan ke semua objek. (2) Penelitian ini masih menggunakan metode kuesioner dalam menentukan data sehingga mengakibatkan penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban dari responden. (3) Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta sehingga kurang luas untuk dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia.

3.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dikemukakan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Diharapkan dapat memperluas objek pada Kabupaten/Kota yang lain agar dapat memperkuat hasil penelitian yang sudah ada. (2) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya

menggunakan metode survey dengan melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. (3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lain yang merupakan faktor-faktor dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika & Suhardjo Yohanes. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No.3. ISSN: 2252-7826.
- Fikri M. Ali, Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martingingsih. 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov, NTB)*. Simposium Nasional Akuntansi 18. USU. Medan.
- Hanafi Rustam. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8, No.16.
- Indriasih, D. 2014. *The Effect of Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward The Quality of Financial Reporting in Local Government*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 20. ISSN 2222-2847.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Juwita, Rukmi. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Vol.12, No.2. ISSN:1411-514X.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*. Edisi Keenam. Bandung: Refika Aditama.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Medika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pradono, Febrian Cahyo & Basukianto. 2015. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No.2. ISSN: 1412-3126.

Sari, D.2012. *Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. ISSN- 2252-3936.

Safitri, Ratna Amalia. 2009. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Semarang)". Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Sukmaningrum, T. dan Harto P. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.

Yuliani, et all. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3, No.2